

Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh

Santi Andriyani.¹ Alumni Program Studi Ilmu Politik, IISIP Jakarta

Abstrak

Temuan dari penelitian, pertama, konflik di Aceh mempunyai latar belakang yang panjang (DI/ TII, GAM, DOM) yang bermuara dengan adanya MoU Helsinki 2005, yang melahirkan kebijakan Otonomi Khusus dan memberikan wewenang berupa pembentukan partai politik lokal Aceh. Kebijakan dari pemerintah pusat ini merupakan wujud dari proses transformasi politik (dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh). Kedua, dalam perkembangannya, Partai politik lokal Aceh belum secara maksimal berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Aceh khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, secara empiris elite yang berada dalam partai politik lokal Aceh terlibat korupsi bantuan sosial, interen eks kombatan partai lokal dalam pemilihan kepala daerah melakukan intimidasi terhadap sebagian masyarakat Aceh. Kemudian ada kasus salah satu mantan anggota GAM yang bernama Din Minimi, karena tidak menerima dana kompensasi melakukan pemberontakan terhadap elite GAM yang duduk di pemerintahan. Kesimpulan penelitian transformasi politik dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal Aceh belum menyentuh pada kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

The findings of the study, firstly, the conflict in Aceh had a long background (DI / TII, GAM, DOM) which led to the 2005 Helsinki MoU, which gave rise to the Special Autonomy policy and authorized the formation of local Acehnese political parties. The policy of the central government is a manifestation of the process of political transformation (from armed movement to local Aceh political party). Secondly, in its development, Aceh's local political party has not maximally contributed to the progress of the people of Aceh, especially in the economic and political fields. In the political field, empirically the elite within Aceh's local political party is involved in the corruption of social assistance, internally former party combatants in the regional head elections intimidate some Acehnese. Then there was the case of one former GAM member named Din Minimi, for not receiving a compensation fund for an insurgency against a GAM-elite who sits in government. The conclusion of political transformation research from Free Aceh Movement (GAM) to Aceh local political party has not touched on the interest of the people of Aceh as a whole.

Key words: *Free Aceh Movement, Helsinki MoU, Special Autonomy, Political Transformation, Aceh Local Political Party*

¹ Alamat: Kampus IISIP Jakarta Jl.Raya Lenteng Agung No.32 Jakarta Selatan 12610. Tel. 021-7806223, 7806224. Fax.021-7817630

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari daerah yang lain. Aceh mendapatkan keistimewaan dan kekhususan dari pemerintah pusat yang biasa disebut otonomi khusus. Untuk memperoleh keistimewaan dan kekhususan tersebut Aceh melewati konflik berkepanjangan hingga terjadi pertumpahan darah. Tidak ada perang yang tidak berakhir, menggambarkan harapan masyarakat Aceh akan terwujudnya perdamaian setelah sekian lama didera konflik sejak dari masalah DI/TII.

Salah satu faktor pemicu konflik adalah adanya ketidaksepahaman antara Aceh dan pemerintah pusat. Dalam sejarah hubungan pemerintah pusat dengan Aceh, pemerintah pusat pernah mengeluarkan kebijakan peleburan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat Aceh. Kondisi tersebut mendorong tokoh masyarakat Aceh untuk bereaksi keras terhadap kebijakan pemerintah pusat, sehingga timbullah pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik ini dapat diredakan dengan diberikannya status Istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan tahun 1959 (Mochamad Nurhasim, 2003).

Pada perkembangannya konflik yang menyita perhatian secara nasional dan perhatian dunia ialah perselisihan antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Latar belakang konflik muncul karena kemarahan atas eksploitasi kekayaan alam Aceh, yang tidak memberikan hasil yang adil bagi masyarakat Aceh. Hal ini menjadikan (pemimpin GAM) memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Bukit Cokan, pedalaman kecamatan Tiro, Pidie (Syamsudin, 1989).

Pada saat itu, Hasan Tiro sangat memahami, tidak mudah menuju jalan merdeka bagi Aceh, sehingga ia mencari pengakuan internasional dan berjuang dengan tema hak menentukan nasib sendiri. Hasan Tiro melakukan lobi internasional dan terus berkampanye tentang "dekolonisasi" Indonesia. Bahkan pada tahun 1980-1990an,

Hasan Tiro bergandengan dengan gerakan separatis lain, seperti Timor-Timur (Fretilin) dan Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada 1980an, ketika gerakannya diserang oleh militer, Hasan Tiro membangun kembali gerakan bersenjata di luar Aceh. Pada 1986, dia memilih Libya sebagai markas pelatihan militer. Empat tahun kemudian dia melatih hampir 800 pemuda Aceh, tidak hanya mengenai keterampilan militer tetapi juga mengenai ideologi dalam perspektif Aceh. Melihat pengalaman Hasan Tiro dalam dunia politik dan kemiliteran, menjadikannya matang untuk memimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Hadirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditanggapi oleh Orde Baru dengan pemberlakuan operasi militer yang lebih dikenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM). Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat berlangsung sejak 1989-1998 dan memakan banyak korban jiwa baik dari anggota GAM, TNI bahkan masyarakat sipil.

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, separatisme semakin mengemuka, tuntutan masyarakat Aceh untuk dapat lepas dari Daerah Operasi Militer (DOM) semakin gencar. Pada tahun 1998, Daerah Operasi Militer di Aceh resmi dicabut oleh pemerintah pusat, kondisi ini tidak membuat keadaan membaik. Peningkatan gerakan provokasi untuk memisahkan dari Indonesia yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semakin gencar, sehingga kondisi pemerintahan Aceh mengalami kelumpuhan.

Dalam kasus Daerah Operasi Militer (DOM) yang berlangsung hampir satu dekade yakni sejak 1989 hingga 1998, pemerintah pusat tidak bisa berharap kasus Aceh maupun trauma rakyat Aceh bisa terselesaikan secara instan. Pemerintah pusat hanya bisa melakukan tindakan nyata yang bersikap konsisten tanpa kekerasan dan secara perlahan-lahan mengurai satu per satu permasalahan yang terjadi di Aceh dengan berbagai tindakan rehabilitasi sosial.

Pasca reformasi masalah perbedaan pandangan dan konflik politik antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus bergulir, sehingga menghambat

proses pembangunan di wilayah ini. Hal ini mengakibatkan masyarakat Aceh kerap berhadapan dengan masalah kekerasan yang tiada berujung, karena kehidupan yang normal seperti saudara-saudaranya di wilayah lain tidak mereka alami.

Dalam rangka menuju perdamaian banyak strategi yang digunakan untuk meredam konflik Aceh, beberapa pergantian Presiden Republik Indonesia sejak lengsernya Orde Baru (ORBA) menjadi salah satu penghambat dalam meredam konflik Aceh, karena strategi perdamaian yang terus berganti pada setiap pergantian Presiden.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Yusuf Kalla (JK), konflik antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai menemukan titik terang. Pertemuan demi pertemuan yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia (Martti Ahtisaari) mulai menunjukkan sikap damai dari pihak GAM. Akhirnya perdamaian berhasil diwujudkan tepatnya 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), perdamaian tersebut lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki.

Perdamaian MoU Helsinki dipandang dapat mengakhiri konflik serta telah membuka konsensus politik baru antara pemerintah

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan berakhirnya konflik, maka keamanan dapat diwujudkan dan melihat bagaimana MoU Helsinki dapat menjadi pendorong dalam melakukan transformasi secara bertahap sehingga dapat mengintegrasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal di Aceh.

Dalam MoU Helsinki terdapat butir kesepakatan untuk memberikan wewenang dalam mendirikan partai politik lokal di Aceh, di mana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkeinginan masuk dalam politik di tingkat lokal. Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal sudah mulai terlihat dengan adanya tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menduduki jabatan politik dalam pemerintahan Aceh lewat jalur pemilihan kepala daerah (PILKADA). Proses ini memperlihatkan bahwa ada itikad baik dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengubah jalur perjuangan mereka dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal.

Bentuk transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik juga dibuktikan dengan pembentukan Partai Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di bawah ini adalah tabel yang berisikan contoh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertransformasi menjadi anggota partai Aceh

Mengacu pada Tabel 1, terlihat adanya

Tabel 1. Transformasi Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke Dalam Partai Aceh

Perbandingan Posisi Personil Partai Aceh dengan Posisi Sebelumnya di GAM		
Nama	Posisi di Partai Aceh	Posisi di GAM
Muzakir Manaf	Ketua Dewan Pimpinan Pusat	Panglima GAM
Muhammad Yahya	Sekjen Dewan Pimpinan Pusat	Kepala Biro Penerangan GAM Pusat
Muksalmina	Ketua Dewan Pimpinan Daerah	Juru Bicara Wilayah Aceh Besar
Malik Mahmud	Anggota Dewan Pembina Partai	Mentri Luar Negeri GAM
Abu Tausi	Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aceh Jaya	Wakil Panglima Wilayah Merhom Daya
Ilyas S. Hamid	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aceh Utara	Juru Propaganda GAM

transformasi politik yang terjadi dari jabatan/posisi di GAM ke posisi partai Aceh. Perubahan yang terjadi ini membutuhkan keterlibatan banyak orang termasuk masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga tujuan akan transformasi politik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dirasakan oleh semua pihak, khususnya masyarakat Aceh.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan partai politik lokal Aceh sudah banyak dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal ataupun berbentuk buku. Berikut ini beberapa penelitian yang mengkaji tentang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan partai politik lokal dapat dilihat pada Tabel 2.

Mengacu pada penelitian yang terdahulu, penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu pertama, topik penelitian mengutamakan kajian tentang proses transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh dengan menjelaskan secara rinci latar belakang konflik sebelum adanya transformasi politik. Kedua, penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pasca terjadinya transformasi menjadi partai politik lokal Aceh khususnya partai Aceh, dengan

identifikasi mengenai kontribusi partai politik lokal terhadap kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Secara umum, penelitian sebelumnya yang mempunyai irisan topik yang serupa dengan penelitian ini telah membantu memahami bagaimana proses transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal Aceh mempunyai proses yang berliku dan panjang, sehingga dapat membantu mempertajam analisa dalam penelitian ini.

Konflik dan Konsensus

Teori konflik berorientasi ke studi struktur dan institusi sosial. Seperti yang terdapat dalam salah satu karya ahli teori konflik yaitu Ralf Dahrendorf (1958,1959) menyatakan bahwa, teoritis konflik di mana masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial dan melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan (Goodman & Goerge, 2007).

Pada kasus konflik Aceh ini memang tepat apa yang dikatakan oleh Dahrendorf. Ketidakadilan dari pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, Dahrendorf melihat intensitas dan kekerasan sebagai dua dimensi konflik kelas yang berbeda secara analitis.

Tabel 2. Penelitian Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Peneliti/Penulis	Judul	Tahun
Mochammad Nurhasim (Buku)	Konflik dan Integritas Politik Gerakan Aceh Merdeka	2008
Muhammad Fajar A.W (Tesis)	Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam	2009
Rakhmat Fadli Zain (Skripsi)	Transformasi Gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh (Dalam Proses Perdamaian)	2009
Fitriyani (Tesis)	Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Partai Politik Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif	2010
Bob Sugeng Hadiwinata, dkk. (Buku)	Transformasi Gerakan Aceh Merdeka, Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara	2010

Intensitas menunjuk pada pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak yang berkonflik, sedangkan kekerasan menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan itu untuk mengejar kepentingan.

Teoritis konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi (Goodman & Goerge, 2007).

Terjadinya konflik yang ada di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadikan Aceh Daerah Operasi Militer (DOM) merupakan konflik yang terjadi secara berkepanjangan. Namun pada akhirnya konflik tersebut menemukan titik jenuh dan terjadi konsensus atau perdamaian pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK) yang disebut perdamaian MoU Helsinki. Teori diatas relevan karena konsensus terjadi setelah adanya konflik sebelumnya.

Separatisme

Sepeti yang dikemukakan Visser, prinsip hak menentukan nasib sendiri, yang sering dijadikan instrumen kaum pemberontak untuk memperkuat posisinya. Gerakan separatis di Aceh yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), terus digempur oleh kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), maksudnya agar mengurungkan niatnya untuk memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dilandasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Gerakan separatisme yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai meredam setelah perjanjian perdamaian MoU Helsinki dan separatisme yang diinginkan Aceh diganti dengan pemberian Otonomi Khusus dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan dimensi ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diartikan bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) masih tetap menjaga dan mempertahankan NKRI dengan mencantumkan pasal-pasal perekat persatuan untuk kepentingan bangsa.

Nasionalisme

Menurut Douglas Weeks, “Nasionalisme merupakan formalisasi dan kesadaran nasional inilah yang membentuk natie dalam arti politik yaitu negara nasional” (Pigay, 2000:54).

Sikap nasionalisme oleh rakyat Aceh dibuktikan oleh sikap Daud Bereueh kepada Soekarno sebelum konflik DI/TII, saat Soekarno memohon agar Aceh tetap berada dipihak Republik dan membantu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan saat itu direspon positif, tidak hanya oleh Daud Bereueh tetapi oleh seluruh ulama Aceh.

Hal lain membuktikan bahwa masyarakat Aceh masih memiliki jiwa nasionalisme. Dengan adanya perdamaian MoU Helsinki, bisa menjadi bukti adanya nasionalisme di Aceh. Aceh yang awalnya menuntut ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlebih saat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) gencar melakukan provokasi untuk separatis namun bisa melunak dengan diberikannya Otonomi Khusus kepada Aceh melalui Nota kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) atau MoU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Transformasi Politik

Secara teoritik, transformasi adalah sebuah proses yang membawa sebuah perubahan fundamental untuk mengamati sebuah keadaan *status quomenjadi* lebih baik (Symporosa, 2005). Transformasi tidak hanya mencakup kebijakan, institusi dan proses tetapi juga nilai dan sikap yang didukung juga dengan adanya perubahan lingkungan.

Proses transformasi politik pada dasarnya adalah sebuah proses yang kompleks karena

membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang ditransformasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut.

MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu tidak hanya membuat perubahan secara fundamental terhadap kondisi perdamaian dari konflik yang terjadi di Aceh tetapi juga memaksa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melakukan transformasi. Salah satu transformasi yang terjadi adalah transformasi dalam bidang politik ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertransformasi menjadi partai politik lokal yaitu Partai Aceh (Basyar, 2008).

Partai Politik

Sigmund Neumann dalam bukunya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah kendaraan dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Fitriyasni, 2010).

Partai Politik Lokal

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 butir 14, dijelaskan bahwa: Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak

dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota.

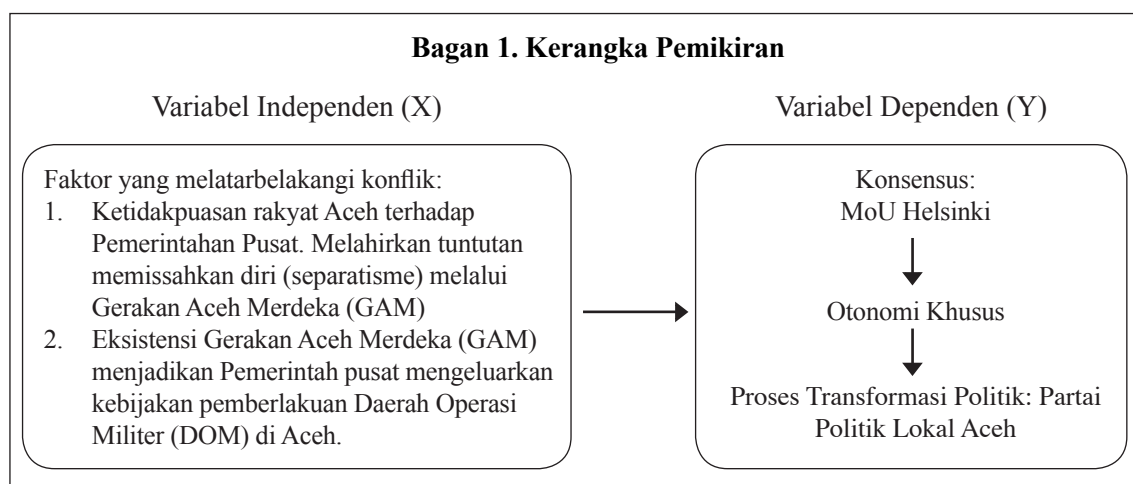
Pada permasalahan yang dibahas mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertransformasi dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh, ideologi partai lokal Aceh lebih tepat masuk pada Partai Regional dan Etnis karena pada kenyataannya partai lokal di Aceh mempunyai tujuan untuk memperbaiki keadaan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan ideologi tersendiri dengan mempertahankan berbagai hal yang menjadi identitas Aceh, seperti dalam hal Agama dan ekonomi yang berasal dari wilayah yang mereka tempati.

Kerangka Pemikiran

Dapat dilihat dalam Bagan 1.

Metode Penelitian

Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahap penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berfikir kritis-ilmiah. Seorang peneliti memulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan dilapangan, kemudian



menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu (Bungin, 2007).

Menurut Burhan Bungin terdapat tiga model dalam desain penelitian kualitatif yaitu desain deskriptif kualitatif, desain kualitatif verifikatif dan desain *grounded research* (penelitian dasar) (Bungin, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif karena menggambarkan kondisi situasi dari sejarah Aceh, konflik Aceh, perdamaian Aceh yang merupakan proses transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa dan memahami data dan fakta yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan tujuan untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya secara mendalam (Irawan, 2006). Unit analisis dalam penelitian ini adalah objek penelitian yaitu transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam (*deep interview*) dengan informan yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan data sekunder (studi pustaka) yang relevan, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal dan sebagainya.

Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif aktivitas mengumpulkan data, menganalisis data dan menyusun laporan bukanlah proses yang dilakukan secara berurutan atau secara linier karena peneliti kualitatif selalu melakukan refleksi atas temuan data diperoleh. Proses analisis data kualitatif berbentuk analisis spiral tidak linier (Creswell, 2002).

Pada penelitian ini proses pengumpulan data berjalan seiring dengan penulisan deskripsi secara komprehensif. Dari awal data-data yang

terkumpul akan diseleksi atas dasar relevansi dan kontribusi terhadap variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Data hasil wawancara mendalam (*deep interview*) dan hasil penelusuran pustaka mempunyai posisi yang setara sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data dari hasil penelusuran pustaka dan hasil wawancara mendalam akan saling melengkapi, mengontrol serta mengkonfirmasi antara satu dengan lainnya

Secara umum rinciannya sebagai berikut: analisis dan deskripsi dari hasil identifikasi dan eksplorasi dari studi pustaka (dokumen) maupun hasil wawancara mendalam dilakukan dengan merunut kebelakang. Artinya, mengidentifikasi semua data secara umum maupun khusus yang mempunyai kaitan dan relevansi dengan konteks yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Dalam catatan sejarah Indonesia, konflik yang terjadi di Aceh menjadi cikal bakal atas perubahan sebuah gerakan pemberontakan yang bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal. Akan tetapi yang patut menjadi catatan adalah partai politik lokal yang terbentuk ini bukan merupakan tuntutan dari konflik yang begitu panjang yang terjadi selama ini, Namun, ini adalah sebuah kesepakatan akhir dari perundingan damai antara RI dan GAM. Sehingga partai politik lokal ini merupakan produk yang dihasilkan pada saat perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia di Helsinki.

Didalam perdamaian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki ada beberapa pokok perjanjian selain diberikannya partai politik lokal. Jadi, perundingan Helsinki telah menghasilkan “Nota Kesepahaman (MoU) yang secara garis besar berisi pokok pikiran yang diuraikan di Tabel 3.

Mengacu pada pokok-pokok perjanjian di atas maka terlihat telah terjadi transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata (kekerasan) menjadi politik (*soft*). Jika melihat perundingan yang berlangsung selama lima putaran seperti yang telah dijelaskan di atas maka transformasi politik GAM terjadi

Tabel 3. Memorandum of Understanding (MoU)

1.	Pemerintah Aceh 1. Pemerintahan Aceh akan diatur dengan Undang-Undang baru, yang akan diperkenalkan 31 Maret 2006. 2. Aceh akan memiliki hak untuk menggunakan simbol daerah seperti bendera, lambang dan himne.
2.	Partisipasi Politik 1. Pemerintah Indonesia memfasilitasi pendirian partai politik berbasis Aceh dalam satu tahun setelah penandatanganan MoU. 2. Masyarakat Aceh memiliki hak untuk ikut berpartisipasi sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah pada April 2006 dan seterusnya.
3.	Ekonomi 1. Aceh mempunyai hak untuk mencari dana pinjaman luar negeri, menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). 2. Aceh akan memperoleh 70% pendapatan dari kekayaan sumber alamnya
4.	Amnesti dan Integrasi 1. Amnesti akan diberikan kepada anggota GAM dan tahanan politik dalam dua minggu setelah penandatanganan kesepakatan. 2. Pemerintah akan memfasilitasi integrasi para anggota GAM kedalam masyarakat. 3. Seluruh anggota GAM sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam politik, ekonomi dan sosial.
5.	Hak Asasi Manusia (HAM) 1. Pengadilan HAM dan komisi kepercayaan dan rekonsiliasi akan didirikan di Aceh.
6.	Pengaturan Keamanan 1. Penghentian pertentangan sesuai dengan perjanjian 2. Pemerintah Indonesia menarik militer non organik dan kekuatan polisi dari Aceh sampai dengan akhir 2005 3. Bersamaan dengan itu, GAM menyerahkan seluruh senjata dan membubarkan 3.000 pasukan.
7.	Pendirian AMM 1. Aceh monitoring Mission (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa (UE) dan lima negara ASEAN. Jika terjadi perselisihan, AMM diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan. Jika tidak selesai, penyelesaian melibatkan Ketua AMM dan ketua perwakilan kedua pihak. Bila itu juga tidak selesai, penyelesaian dibawa ke tingkat Menkopolhukam, pimpinan GAM, pimpinan CMI dan pihak UE.

pada putaran ketiga. Pada putaran ketiga ini, perundingan membahas sejumlah agenda yang telah disepakati sebelumnya yaitu partai politik lokal, partisipasi politik (pemilu lokal), amnesti perekonomian, dan keamanan. Dalam putaran ini perundingan antara RI dan GAM membicarakan sejumlah isu yang krusial. Isu di bidang politik, khususnya partai politik lokal dan pemilu lokal.

Aspek politik dan keamanan merupakan

agenda yang paling banyak menyita waktu dan perdebatan dalam perundingan. Dalam pandangan Kingsbury, pakar ilmu politik dari Universitas Deakin Australia, yang selalu mendampingi wakil GAM saat berunding dengan juru runding Indonesia, bahwa soal partai politik lokal merupakan hasil kompromi di meja perundingan. Pembentukan partai politik lokal adalah solusi demokratis dan praktis, karena

sejarah telah membuktikan masalah tidak bisa diselesaikan secara militer (Nurhasim, 163).

Transformasi politik GAM yang terjadi, juga terlihat dari adanya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pada 11 Maret 2006 telah dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan misi untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik domestik maupun asing untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan reintegrasi Aceh menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh, mengakomodasi dan memantau pemberdayaan di kabupaten/kota agar realisasi program sejalan dengan upaya pemenuhan kesepakatan MoU.

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) hanya menjadi salah satu lembaga koordinasi dalam proses transformasi yang terjadi, karena sebenarnya faktor lain yang juga penting adalah adanya keterlibatan dan dukungan dari pemangku kepentingan (*stackholder*) dari semua level, tidak terkecuali dari tingkat lokal sekalipun. Upaya untuk mendorong peran aktif pemangku kepentingan lokal dalam mentransformasikan mantan anggota GAM politik menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Keterlibatan pemegang kepentingan lokal ini, khususnya pemerintah lokal dan pihak GAM mutlak diperlukan.

Peran GAM dalam proses transformasi ini menjadi penting untuk diperhatikan, terutama dengan masuknya kalangan GAM ke dalam pemerintahan lokal pasca Pilkada langsung 2006. Kemenangan tersebut telah membuka jalan bagi kalangan GAM yang sebelumnya bukan hanya berada di luar melainkan berhadapan dengan pemerintah, untuk terlibat langsung dalam proses kebijakan publik di Aceh. Dalam pilkada langsung tahun 2006, calon kepala daerah dari kalangan GAM berhasil meraih kemenangan di beberapa daerah. Selain jabatan Gubernur Aceh yang diraih oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, GAM juga berhasil menempatkan mantan anggotanya sebagai orang nomor satu di beberapa daerah, yaitu Kota Sabang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara

dan Kota Lhoksema (Zain, 2009).

Tampilnya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai pemenang dalam Pilkada di Aceh, merupakan kekuatan alternatif yang dilatar belakangi oleh lelahnya masyarakat Aceh terhadap masalah-masalah yang tidak pernah selesai. Pada titik tertentu Irwandi dan Nazar menemukan perbedaan, karena latar belakang mereka memang berbeda. Irwandi berasal dari elemen GAM, sementara Nazar berasal dari SIRA, di mana harapan masyarakat Aceh diamanatkan kepada mereka untuk menampung aspirasinya.

Pada tahun 2008, KPU pusat meloloskan 6 partai politik lokal Aceh yang dapat mengikuti pemilu 2009 yaitu; 1. Partai Aceh, 2. Partai Rakyat Aceh (PRA), 3. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), 4. Partai Aceh Aman Sejahtera, 5. Partai Bersatu Atjeh (PBA), 6. Partai Daulat Aceh.

Keberadaan partai lokal dan persaingan politik di antara partai nasional mewarnai konstelasi politik Aceh dan pemerintah pusat dalam menghadapi pemerintahan Aceh pada masa-masa selanjutnya. Hal ini dikarenakan tidak semua masalah Aceh diselesaikan di tanah Aceh sendiri, melainkan juga masuk ke dalam sistem politik nasional. Kehadiran partai politik lokal menjadi hal yang penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu mempersingkat transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui partai tidak memenuhi syarat keterbukaan dalam dimensi demokrasi modern.

Kehadiran 12 partai politik lokal, yang kemudian hanya 6 partai politik yang lolos dalam pemilu nasional 2009, menunjukkan adanya dinamika politik yang cukup tinggi dalam mengartikulasikan kepentingan melalui jalur formal. Kehadiran partai politik yang beragam untuk memperebutkan 2,2 juta suara yang berhak memilih menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan secara sah.

Pada saat pemilu 2009, transformasi politik Aceh digambarkan dengan ketatnya persaingan

antara partai lokal dan partai nasional dalam memperebutkan suara rakyat. Antusias rakyat Aceh untuk mendukung partai lokal khususnya partai Aceh sangat besar, hal ini dapat dilihat ketika kampanye partai Aceh mampu mengkonsolidasi ribuan masyarakat sipil dan partai Aceh menang pemilu dengan perolehan suara mencapai 48,78 dan 33 kadernya telah mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sedangkan di tingkat kabupaten/kota partai Aceh menguasai 237 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 21 kabupaten/kota di Aceh.

Keberhasilan Partai Aceh dalam memenangkan pemilu 2009 menunjukkan bahwa dukungan rakyat Aceh kepada partai Aceh yang berasal dari eks kombatan sangat kuat. Namun dukungan masyarakat yang positif tersebut itu tidak menjadikan partai Aceh tetap solid dalam memperjuangkan kewenangan Aceh yang telah diatur dalam UUPA. Terlihat bahwa kader partai Aceh di DPRA belum menunjukkan kemajuan untuk mewujudkan cita-cita MoU Helsinki dan sering terjebak pada berbagai persoalan pragmatis, kemudian berakibat terjadinya keretakan dan kecemburuan antara sesama eks-kombatan.

Pada pilkada Aceh 2012, kemenangan diraih oleh partai Aceh yang membawa Zaini Abdullah sebagai Gubernur dan Muzakir Manaf sebagai wakil Gubernur. Kemenangan ini didapat melalui berbagai strategi kampanye. Salah satu kemenangan yang mereka peroleh ternyata melalui cara yang tidak sesuai dengan spirit demokrasi, yaitu melalui intimidasi kepada masyarakat Aceh. Intimidasi yang dilakukan oleh partai Aceh di antaranya melalui cara menempatkan mata-mata pada kampung-kampung yang tersebar di Aceh, saat perhitungan suara ada yang memilih selain partai Aceh, maka akan dicari dan diperlakukan seperti orang yang sudah melakukan kejahatan besar. Hal ini menjadikan banyak warga merasa takut karena dikucilkan oleh lingkungan, intimidasi ini hingga sampai pada adanya teror pada rakyat Aceh.

Gambaran di atas merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh masyarakat Aceh, ketika terjadinya proses transformasi politik dari

kekerasan bersenjata ke arah politik yang bersifat *soft* melalui partai politik.

Kontribusi Partai Politik Lokal Aceh Terhadap Kehidupan Masyarakat Aceh

Kehadiran partai politik lokal di Aceh, merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat, proses demokratisasi telah berlangsung di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh bisa lebih terbuka untuk menunjukkan sikap politiknya melalui partai politik lokal yang terbentuk di Aceh.

Dalam perkembangannya, kontribusi partai politik lokal Aceh khususnya partai Aceh yang sekarang banyak mendapat kursi di pemerintahan Aceh telah dipertanyakan, karena sudah satu dekade berlalu Aceh mendapat kesempatan untuk dapat dapat memimpin sendiri, dengan diberikannya kebebasan untuk mendirikan partai politik lokal, namun masyarakat Aceh masih belum merasakan aspirasinya terwakilkan.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari salah satu orang Aceh Singkil, yang dapat digeneralisasi dengan pandangan masyarakat secara umum bahwa masyarakat Aceh tidak merasakan perubahan pasca pemerintahan Aceh banyak dipimpin oleh orang-orang eks kombatan (GAM) yang berasal dari partai Aceh. Salah satu hal yang mengemuka adalah banyaknya kasus korupsi di pemerintahan Aceh menjadi gambaran bahwa mereka tidak mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sendiri. Bahkan didapati permasalahan intern antara eks kombatan, yang semakin terlihat hanya memperebutkan kursi kekuasaan yang ada di Aceh. Kemudian, secara empiris juga didapati banyak eks kombatan (GAM) yang kecewa dengan petinggi-petingginya, karena janji untuk memberikan kompensasi (modal usaha) untuk para mantan anggota GAM tidak sampai pada mereka, sehingga mereka tetap hidup miskin dan susah.

Masalah korupsi yang mengemuka di Aceh pasca adanya transformasi politik dari Gerakan

Aceh Merdeka (GAM) ke partai politik lokal, diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 837.000 orang atau 16,98%. Tingginya tingkat korupsi dan tingkat kemiskinan Aceh menggambarkan salah satu faktor dari carut marutnya kondisi ekonomi Aceh saat ini. Realita tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang Aceh asal Lhoksemauwe yang mengatakan bahwa adanya partai politik lokal tidak bisa menampung aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat Aceh ada yang lebih percaya kepada partai nasional yang berasaskan Islam seperti PKS, PPP, sehingga tidak semua pilihan masyarakat Aceh tertuju pada partai politik lokal.

Kesimpulan

Proses transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh, diawali dari konflik Aceh yang mempunyai latar belakang yang panjang. Permasalahan DI/TII Pemberontakan ini muncul pada tahun 1953 yang merupakan protes terhadap perlakuan Pusat yang menempatkan Aceh dan masyarakatnya dalam kondisi ketidakpastian wilayah Aceh dan merasa janjinya diingkari oleh Presiden Soekarno.

Konflik GAM dan DOM yang berlangsung sejak tahun 1989 sampai 1998 dengan banyaknya korban jiwa dari pihak TNI, anggota GAM dan bahkan masyarakat sipil. Hingga akhirnya bermuara dengan adanya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 tepatnya pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). MoU Helsinki ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.

Momentum perdamaian melahirkan kebijakan Otonomi Khusus, yang di dalamnya berupa kebijakan dalam hal ekonomi, amnesti dan integrasi, HAM dan partisipasi politik yang salah satunya berupa wewenang pembentukan partai politik lokal Aceh dari kebijakan Pemerintah Pusat dan ini merupakan wujud dari proses transformasi politik.

Kontribusi partai politik lokal Aceh khususnya Partai Aceh yang sekarang banyak mendapat kursi di pemerintahan Aceh telah dipertanyakan, karena sudah satu dekade berlalu Aceh mendapat kesempatan untuk dapat memimpin sendiri pemerintahan yang ada dengan diberikannya kebebasan untuk mendirikan partai politik lokal, namun masyarakat Aceh masih banyak yang belum merasa aspirasinya terwakilkan.

Saran

Masalah transformasi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah hal yang baik apabila disertai pendidikan politik yang dapat menunjang perubahan tersebut. Karena, Perubahan pola perjuangan dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik menuntut sebuah kesiapan baik dari internal organisasi maupun dukungan kondisi lingkungan seperti perangkat kebijakan dan perundangan yang menunjang dan masalah korupsi yang terjadi di Aceh harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, karena pemerintahan Aceh tidak akan semakin baik dengan adanya pembiaran dalam kasus korupsi.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Basyar, Hamdan, 2008, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W, *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK Press, 2002.
- Heywood, Andrew, 2014, *Politik*, Edisi Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- J. Goodman, Douglas & Ritze, George, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasim, Moch. Dkk. 2003, *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor*

Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian, Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI.

Nurhasim, Moch, 2008, *Konflik Dan Integrasi politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus Normatif Antara RI-GAM Dalam Perundingan Helsinki*, Jakarta: P2P LIPI.

Pigay, Decki Natalis, 2000, *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Konflik Politik di Papua (Sebelum, Saat dan Sesudah Integrasi)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rakmad, Fadli Zain, 2009, *Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai*

Aceh (Dalam Proses Perdamaian). Skripsi UI.

Symporosa Wilibald Rembe, 2005, *The Politic of Transformation In South Africa : An Evaluation of Education policies And Their Implementation with Particular Reference To The Eastern Cape Province*, Rhodes University.

Syamsudi, Nazarudin, 1998, *Revolusi Di Serambi Mekkah*, UI Press.

Tesis:

Fitriyasni, 2010, *Peluang Dan Kendala Politisi Perempuan Dalam Partai Politik Lokal Aceh*, Tesis UI.